



Xedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

SUMBANGAN DOMPET KR "COVID-19"
REKENING BCA
NO. : 126.556.5656
A/n : BP KEDAULATAN RAKYAT PT
NO. : SEBAGAI BUKTI MOHON STRUK TRANSFER DI KIRIM KE NO.WA : 081.2236.0972

http://www.krjogja.com

SELASA LEGI

29 JUNI 2021 (19 DULKAIDAH 1954 / TAHUN LXXVI NO 264)

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

SELASA LEGI, 29 JUNI 2021
(19 DULKAIDAH 1954)

OPINI

"KEDAULATAN RAKYAT"
HALAMAN 11

TAJUK RENCANA

Menimbang Penguncian Pulau Jawa

ANGKA kasus positif Covid-19 terus meroket, baik di level nasional maupun DIY. Di level nasional angkanya sudah menyentuh 21.000 perhari, sedang di DIY sampai 800 lebih perhari. Angka tersebut terus naik seiring dengan diperluasnya vaksinasi di seluruh daerah. Target 1 juta vaksin perhari pun sudah tercapai, bahkan kini bisa mencapai 1,3 juta vaksin perhari. Namun, mengapa kasus Covid-19 tak kunjung menurun, bahkan terus meroket dari hari ke hari?

Inilah yang harus diatasi sesegera mungkin. Melihat peta sebaran kasus Covid-19 di Indonesia, harus diakui Pulau Jawa mendominasi jumlah. Di pulau Jawa fasilitas kesehatan relatif lebih baik ketimbang daerah lain, seperti kawasan Indonesia Timur. Meski begitu, kini semua rumah sakit kewalahan menangani pasien yang terpapar Covid-19. Sehingga mereka terpaksa ditempatkan di tenda-tenda darurat karena IGD rumah sakit sudah penuh pasien. Kondisi RS-RS di DIY tak jauh beda dengan daerah lainnya di Pulau Jawa, bahkan ketersediaan tempat tidur (BOR) fasilitas kesehatan di 5 provinsi di Jawa, yakni DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY sudah menunjukkan warna merah.

Berkaitan itulah tak mengherankan bila Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Presiden Jokowi segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional di seluruh daerah. Atau, setidaknya mengunci Pulau Jawa yang kemudian berimplikasi pada penutupan sekolah, perkantoran, serta pusat perbelanjaan, kecuali di sektor usaha vital. Usulan tersebut tentu dilandasi kenyataan bahwa PPKM mikro yang kini dketatkan belum terlihat hasil-

nya, bahkan cenderung tidak efektif.

Usulan mengunci Pulau Jawa tentu sangat menarik dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan. Bisa saja, usulan tersebut dimodifikasi agar lebih luwes, misalnya tidak mengunci secara total Pulau Jawa, melainkan dengan menerapkan aturan-aturan yang lebih ketat. Penguncian secara total boleh dibalang cara ekstrem untuk meredam penyebaran Covid-19 dan itu baru dipertimbangkan sebagai alternatif terakhir, ketika pengetatan PPKM mikro memang tidak efektif.

Langkah yang selama ini dilakukan daerah, tak terkecuali DIY, sebenarnya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk dalam melakukan pengetatan PPKM mikro. Hanya saja, bisa kita saksikan pelanggaran proses terus berlangsung dan terkesan aparat kedodoran menangani lantaran jumlah personalnya terbatas.

Khusus DIY, dibutuhkan langkah terstruktur untuk menekan laju Covid-19. Sebab, sampai saat ini kasus positif Covid-19 di DIY belum ada tanda-tanda melandai. Yang terjadi justru kasus baru meningkat terus, bahkan memecahkan rekor, di atas 800 kasus positif (KR 28/6). Disebut-sebut ini belum mencapai puncaknya, yang artinya angka itu masih bisa meroket lagi.

Hemat kita, perlu ada langkah ekstrem untuk menekan angka Covid-19 terutama di Pulau Jawa. Penaatan terhadap proses menjadi tolok ukur keberhasilan pengendalian penanganan Covid-19. Namun, untuk menjamin ketepatan proses dibutuhkan instrumen pemaksa, yakni hukum. Hukum inilah yang akan memaksa warga untuk taat proses, baik suka maupun tidak suka. □

Sinau Sejarah di Era Pandemi

SUDAH setahun lebih pagelbug Covid-19 merusak tatanan belajar siswa, tanpa kecuali sinau sejarah. Ambilhah misal, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY menggelar acara *Lawatan Sejarah* (22-24 Juni 2021). Dalam kondisi normal, puluhan peserta dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur diajak blusukan ke objek sejarah. Namun, gara-gara pandemi lembaga plat merah ini harus memutar otak.

Lawatan Sejarah digelar secara daring dan luring. Bagi peserta dari Kota Gudeg 'dikandangkan' di hotel, sedangkan peserta dari Jateng dan Jatim mengikutinya secara daring. Lantaran tidak bisa mendatangi objek sejarah, maka mereka disuguhkan film yang telah dipersiapkan panitia. Film diputar, dan peserta diajak berdiskusi. Salah satu film yang mencuri perhatian berjudul 'Lebet Regol Danawara: Dinamika Budaya Dari Pura Pakualaman'.

Pura Pakualaman
Menyimak film itu, ada sekepung kisah menarik yang bisa ditangkap. Pura Pakualaman merupakan "anak ragil" dari Dinasti Mataram Islam. Kebetulan, sederet tokoh hebat lahir dan menggetarkan panggung sejarah sebagai buah dari sistem pendidikan yang diprioritaskan keluarga Pakualaman.

Orang-orang kreatif bermunculan dari kadipaten kecil ini, dan menjadi manusia yang melampaui masanya. Selain Ki Hadjar Dewantara dan Soerjapranoto "raja mogok", kita diingatkan riwayat Notosuroto, putra Pangeran Notodirejo, dan cucu PA V. Ayahnya meleak pendidikan, maka lelaki bertanggal lahir 5 Juni 1888 itu sedari kecil dipahamkan pentingnya pendidikan. Pasalnya, pendidikan merupakan alat mencapai kesejahteraan derjat dengan penguasa kolonial. Selain edukasi model Barat, pendidikan Jawa juga digeluti mengingat latarbelakang keluarga bangsawan.

Mengambil jurusan hukum di Univer-

Heri Priyatmoko

sitas Leiden, dan menjadi orang pribumi pertama yang menempuh ujian kandidat sarjana hukum tahun 1911. Selama di Belanda, Notosuroto mengakrabi dunia jurnalistik, dan rajin mengirim artikel masalah Hindia Belanda di *Nieuwe Rotterdamse Courant*. Notosuroto berpendapat bahwa pemerintah kolonial dan pribumi hendaknya bekerja sama karena keduanya saling membutuhkan.



KERJOKO SANTOSO

ambil Notosuroto tidak umum. Langit Pakualaman mendung, 21 Juli 1961, Notosuroto masuk rumah sakit diterjang liver, paru-paru, dan ginjal. Tak berselang lama, maut menjemputnya. Saat meninggal, tak banyak yang memperhatikan.

Dari paparan kisah historis di atas, para siswa mengerti bahwa lewat bidang edukasi, lahir tokoh brilian dari jagad aristokrasi. Penitradisian akan pentingnya pendidikan seperti periode kerajaannya menjadi sumber keteladanan. Muaranya, munculnya sikap berpihak pada wong cilik. Kita disadarkan pula, perbedaan ideologi tak pernah menyebabkan tokoh di masa silam saling berseberu, apalagi baku hantam. Kalau ujungnya pecah perseteruan, itu ditempuh melalui perang opini dalam media massa dan diskusi, bukan menggerakkan massa dan dirampungkan dengan senjata.

Di sinilah, peserta didik bisa mengunduh saripati kehidupan tokoh di masa lampau. Perseteruan atas nama kelompok, agama, suku sebenarnya sangat tidak mencerminkan karakter Indonesia yang majemuk, dan menerima perbedaan dengan lantang terbuka. Sebab itulah, sungguh bijaksana jika kita kembali menelusuri jejak para tokoh yang mewarnai pergerakan nasional dengan jalannya masing-masing. Sekalipun musim pagelbug, belajar koarfan di masa silam tak boleh mandeg. □

***) Heri Priyatmoko A, Dosen Sejarah Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan menginjak artikel untuk SKH Kedaualatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 500 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik